PERBANDINGAN SANKSI PIDANA PELAKU SEKS BEBAS DALAM QANUN ACEH DAN KUHP INDONESIA

Oleh: Jalil Latif;[1] Abunawas Had[2]

[1]Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia
[2]Prodi Ilmu Hukum, Universitas Tanjungpura, Indonesia
Email: abu.nawas@hukum.untan.ac.id

Article history:
Submitted: 06-07-2023 **Revised:** 14-09-2023 **Accepted:** 22-06-2024

Abstract

The study was intended to analyze the existence of criminal sanctions against premarital sex in a legal perspective on qanun in aceh and Indonesia's positive laws. Premarital sex is sexual behavior outside the bonds of marriage that conflict with religious values and social norms. Premarital sex offenders can be punished on the basis of qanun's laws in aceh and Indonesia's positive laws. The study uses normative research methods by analyzing qanun aceh resources and Indonesia's positive laws relating to criminal sanctions against premarital sex. Criminal penalties used in qanun's law in aceh involve a maximum flogging of 100 times. On the other hand, Indonesia's positive laws also set out criminal penalties against sexually promiscuous people. However, there is an approach between qanun's law in aceh and Indonesia's positive laws on premarital sex management. Qanun aceh focuses more on aspects of religion and morals, while in the context of Indonesia's positive laws which have a diversity of religion and culture, the implementation of criminal sanctions against sexually premarital sex should also be concerned about the principle of justice and religious freedom.

Keywords: Law; Criminal Code; Criminal sanctions; Free sex; Aceh Qanun.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi sanksi pidana terhadap pelaku seks bebas dalam perspektif hukum Qanun di Aceh dan hukum positif Indonesia. Seks bebas merupakan perilaku seksual di luar ikatan perkawinan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma sosial yang ada. Pelaku seks bebas dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan hukum Qanun di Aceh dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan analisis terhadap sumber-sumber Qanun Aceh dan hukum positif Indonesia terkait dengan sanksi pidana terhadap pelaku seks bebas. Eksistensi Sanksi pidana yang diterapkan dalam hukum Qanun di Aceh meliputi hukuman cambuk maksimal 100 kali. Di sisi lain, hukum positif Indonesia juga

mengatur sanksi pidana terhadap pelaku seks bebas. Namun, terdapat perbedaan pendekatan antara hukum Qanun di Aceh dan hukum positif Indonesia dalam menangani pelaku seks bebas. Qanun Aceh lebih berfokus pada aspek agama dan moral, sementara dalam konteks hukum positif Indonesia menggunakan pendekatan kenegaraan yang mana memiliki keberagaman agama dan budaya, maka implementasi sanksi pidana terhadap pelaku seks bebas juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan kebebasan beragama dan kenegaraan khususnya terhadap hukum yang telah diberlakukan oleh Negara Indonesia.

Kata Kunci: Hukum; KUHP; Sanksi Pidana; Seks Bebas; Qanun Aceh.

A. Pendahuluan

Di era yang semakin berkembang ini, banyak pengaruh budaya barat yang masuk ke Indonesia. Hal ini tidak hanya terkait dengan budaya yang berkaitan dengan kesenian, tetapi juga terkait dengan budaya gaya hidup bebas. Budaya gaya hidup bebas juga terkait dengan pergaulan bebas seperti budaya seks bebas. Seks bebas adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada aktivitas seksual yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan. Di Indonesia, praktik seks bebas dianggap tabu dan bertentangan dengan nilai-nilai sosial, agama, dan budaya yang dominan.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, Indonesia menganut nilai-nilai yang konservatif dalam hal hubungan seksual. Seks dianggap sebagai sesuatu yang sebaiknya dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah, sebagai wujud dari komitmen antara seorang pria dan seorang wanita. Praktik seks di luar pernikahan dianggap melanggar norma-norma moral dan dapat menghadirkan konsekuensi sosial, seperti stigma, pengucilan, atau sanksi hukum. Di Indonesia, ada sekitar 4,5% remaja laki-laki dan 0,7% remaja perempuan usia 15- 19 tahun yang mengaku pernah melakukan seksual pranikah.[1]

Penelitian ini untuk menganalisis eksistensi sanksi pidana terhadap pelaku seks bebas, baik ditinjau dari hukum Qanun di Aceh maupun hukum positif Indonesia. Melalui pembandingan antara kedua sistem hukum tersebut dapat memahami perbedaan pendekatan hukum dan dampaknya terhadap pelaksanaan

[1] Rina Andriani, Suhrawardi, and Hapisah, "Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Remaja Dengan Perilaku Seksual Pranikah," *Jurnal Inovasi* 2, no. 10 (2022): 3441–46.

sanksi pidana terhadap pelaku seks bebas di Aceh dan di wilayah lain di Indonesia pada umunya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas sanksi pidana dalam mencegah dan menanggulangi perbuatan seks bebas serta untuk mengevaluasi keadilan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku.

Dengan pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan hukum dan budaya di Aceh serta sistem hukum positif Indonesia, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi penegak hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat secara umum. Perilaku seks bebas ini tentunya bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selain itu, tindakan seks bebas ini juga bertentangan dengan norma serta hukum dalam agama Islam.

Eksistensi sanksi pidana terhadap pelaku seks bebas menjadi topik yang menarik untuk dibahas dalam konteks hukum Qanun di Aceh dan hukum positif Indonesia. Seks bebas, yang secara umum dianggap sebagai perbuatan yang melanggar norma-norma sosial dan moral, memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana penegakan hukum dapat mengatasi fenomena ini dan menjamin keadilan bagi masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya dan nilai-nilai yang beragam. Hukum Qanun di Aceh didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, sedangkan hukum positif Indonesia memiliki landasan hukum yang berlaku secara umum di seluruh negara. Dalam menghadapi fenomena seks bebas, perbedaan budaya dan nilai-nilai ini dapat mempengaruhi pendekatan hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku.

Hukum Qanun di Aceh adalah salah satu bentuk kekhususan atas kedudukan daerah otonomi khusus dalam mengatur dan menjalankan sistem hukumnya. Dalam konteks ini, eksistensi sanksi pidana terhadap pelaku seks bebas di Aceh juga dapat dilihat sebagai penghormatan terhadap kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah. Namun, perlu juga diperhatikan bahwa penghormatan terhadap otonomi daerah tidak boleh melanggar prinsip-prinsip hukum positif Indonesia.[2]

[2] Mustafa Mh, "ULIL AMRI AUTHORITY ON LIMITATION OF CONGREGATIONAL WORSHIPS IN THE PANDEMIC OF COVID-19 IN PERSPECTIVE OF FIQH SIYASAH," *Jurnal Al-Dustur* 3, no. 2 (September 10, 2020): 123–35, https://doi.org/10.30863/jad.v3i2.899.

Eksistensi sanksi pidana terhadap pelaku seks bebas juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan harus memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis apakah sanksi pidana yang diterapkan di Aceh dan Indonesia secara umum telah memenuhi standar keadilan dan hak asasi manusia.

B. Metode Penelitian

Pilihan objek penelitian dalam studi ini adalah eksistensi sanksi pidana terhadap pelaku seks bebas dalam konteks hukum Qanun di Aceh dan hukum positif Indonesia. Objek penelitian meliputi peraturan hukum yang mengatur seks bebas, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku seks bebas, beserta dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif antara hukum Qanun di Aceh dan hukum positif Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang melibatkan analisis dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan. Data yang terkumpul akan dianalisis dan dikelompokkan berdasarkan tema atau topik yang relevan dengan penelitian ini, seperti peraturan hukum, penerapan sanksi pidana, dan dampaknya terhadap masyarakat.

C. Pembahasan

1. Eksistensi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Seks Bebas ditinjau Melalui Pendekatan Hukum Qanun Di Aceh dan Hukum Positif Indonesia

Perilaku seks bebas mengacu pada praktik atau tindakan seksual yang dilakukan tanpa adanya keterlibatan yang sah, seperti pernikahan atau hubungan yang diakui secara hukum. Perilaku seks bebas, yakni perilaku yang meliputi pernah melakukan kissing, necking, petting, hingga intercourse.[3] Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai dua pendekatan hukum untuk menghukum pelaku tindakan seks bebas, yaitu hukum Qanun Aceh dan hukum positif Indonesia.

3 Dewi Sartika Rahadi, Sofwan Indarjo, "Perilaku seksual informan adalah perilaku seks bebas yaitu pernah melakukan kissing, necking, petting, hingga intercourse.", Jurnal of Health Education, Vol.2 No.2, Februari 2018, h. 118.Dewi Sartika Rahadi and Sofwan Indarjo, "Perilaku Seks Bebas Pada Anggta Club Motor X Kota Semarang Tahun 2017," *Journal of Health Education* 2, no. 2 (2017): 115–21.

Qanun Aceh merupakan hukum yang berlandaskan syariat Islam. Dalam Islam, zina terbagi menjadi:

a. *Zina Al-Lamam*, yakni perbuatan keji yang berkaitan dengan panca indera, yakni seperti kedua mata yang melihat lawan jenis yang bukan muhram;
b. *Zina Muhsan*, yakni perbuatan bagi orang yang telah menikah dan melakukan perselingkuhan hingga melakukan hubungan intim. Biasanya, jenis zina ini terjadi karena melakukan hubungan intim yang bukan mahramnya;
c. *Zina Gairu Muhsan*, yakni perbuatan yang dilakukan bagi seseorang yang belum terikat dalam pernikahan yang mendapat godaan dan hawa nafsu yang tinggi. Dalam hal ini, seks bebas dapat dikatakan sebagai Zina Gairu Muhsan, yang mana Seks bebas dilakukan oleh orang yang belum terikat pernikahan.

Menurut Pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan bahwa :[4]

a. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
b. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Sedangkan, dalam hal Hukum Positif Indonesia, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, terkait dengan tindakan seksual di luar pernikahan atau hubungan yang diakui secara hukum diatur dalam Pasal 284 KUHP yang mengatur tentang perzinahan. Pasal ini mengatur bahwa Pasal 284

4 Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

KUHP mengatur bahwa hubungan seksual di luar nikah dapat dianggap zina jika pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang yang sudah menikah atau sedang menjalani pernikahan. Namun, pidana yang dijatuhkan hanya penjara paling lama 9 bulan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa menurut Hukum Qanun Aceh, pelaku seks bebas dapat dihukum dengan maksimal cambuk 100 kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 gram emas murni. Teruntuk jika seseorang tidak mampu dicambuk, maka hukumannya adalah dipenjara, yakni dengan penjara paling lama 12 bulan. Sedangkan, berdasar hukum positif Indonesia bagi pelaku seks bebas tidak diberlakukan hukum cambuk, tetapi dapat dipidana penjara selama 9 Bulan.

2. Perbedaan Pendekatan Hukum dalam Mengatasi Pelaku Seks Bebas antara Hukum Qanun di Aceh dan Hukum Positif Indonesia.

Qanun merupakan bentuk hukum yang telah menjadi legal formal.[5] Artinya hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif.[6] dengan kata lain, ganun merupakan hukum positif yang berlaku pada satu negara yang dibuat oleh pemerintah, sifatnya mengikat, dan ada sanksi bagi yang melanggarnya.[7] Qanun dalam arti hukum tertulis yang telah diundangkan oleh negara bertujuan untuk: (a) Mendatangkan kemakmuran; (b) Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai; (c) Mencapai dan menegakkan keadilan; (d) Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya tidak terganggu.[8]

Qanun atau peraturan perundang-undangan khususnya di Indonesia bersumber pada tiga hukum: hukum kolonial, hukum Islam, dan hukum adat, yang dinamai "trikhotomi" sebagai simbol dari persaingan tiga hukum tersebut. Di Indonesia bersumber pada tiga hukum: hukum kolonial, hukum Islam, dan hukum adat, yang dinamai "trikhotomi" sebagai simbol dari persaingan tiga hukum tersebut.

5 Auda Jasser, "Book Review : Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach," *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 2014, 59.

6 Deddy Ismatullah, *Materi Kuliah Sejarah Sosial Hukum Islam*, 2007.

7 Rachmat Syafe'i, *Materi Kuliah Qânûn Dan Śyarî'ah*, 2007.

8 C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, 1992.

Dasar Kebijakan Qanun di Aceh Pelaksanaan qanun di Provinsi Aceh tentu saja memiliki beberapa landasan yuridis, di antaranya: Pertama, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan Syariat Islam merupakan keistimewaan bagi Aceh. Keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spritiual, moral, dan kemanusiaan. Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.[9]

Secara tegas dalam KUHP pasal 284 menyatakan: "Perzinaan (persetubuhan diluar nikah) akan dikenakan sanksi bila dilakukan oleh pria dan wanita yang telah menikah, itu pun jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan". Artinya jika perzinaan itu dilakukan oleh bujang-lajang, suka sama suka, maka pelakunya tidak dikenakan sanksi.

Apa yang melatarbelakangi negara Indonesia melegalkan seks bebas? Bila kita pergi kebeberapa kota besar yang ada di Indonesia, nampak dengan jelas para perempuan yang menjajakan seks bebas dipinggir jalan. Seks bebas yang dilakukan di Indonesai tidak mengenal umur, bila ada uang dan suka sama suka. Maka silakan lakukan seks, tidak ada penyimpangan hukum.

Perbedaan pendekatan hukum dalam mengatasi pelaku seks bebas antara hukum Qanun di Aceh dan hukum positif Indonesia cukup berbeda karena Aceh memiliki otonomi khusus dalam penerapan syariat Islam. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara kedua pendekatan

a. Dasar Hukum:

Hukum Qanun di Aceh: Hukum Qanun di Aceh didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam dan diatur oleh Aceh Syariah Criminal Code. Qanun ini mengacu pada ajaran Islam dalam menetapkan norma dan sanksi pidana.

9 Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam Di Aceh*, 2007.

Hukum Positif Indonesia: Hukum positif Indonesia didasarkan pada konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional.

b. Sumber Hukum:

Hukum Qanun di Aceh: Sumber hukum utama di Aceh adalah hukum Islam, termasuk Al-Quran, Hadis, Ijma' (kesepakatan ulama), dan Qiyas (analogi hukum). Penetapan hukum Qanun melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan persetujuan pemerintah pusat. Hukum Positif Indonesia: Sumber hukum utama di Indonesia adalah konstitusi, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif, yudisial, dan eksekutif, serta kebiasaan hukum yang berlaku di masyarakat.

c. Lingkup Penerapan:

Hukum Qanun di Aceh: Hukum Qanun di Aceh berlaku secara khusus di Provinsi Aceh. Hukum ini diterapkan pada warga Aceh, termasuk penduduk non-Muslim yang tinggal di Aceh. Hukum Positif Indonesia: Hukum positif Indonesia berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan diterapkan pada semua penduduk tanpa memandang agama atau kepercayaan mereka.

d. Jenis Pelanggaran:

Hukum Qanun di Aceh: Hukum Qanun di Aceh mencakup berbagai pelanggaran yang dianggap melanggar ajaran Islam, termasuk pelaku seks bebas. Hukuman yang diberikan dapat berupa cambuk, kurungan, atau sanksi lain sesuai dengan hukum Islam. Hukum Positif Indonesia: Hukum positif Indonesia juga mengatur pelanggaran terkait perilaku seksual, namun pendekatannya lebih beragam. Pelaku seks bebas dapat dijerat dengan undang-undang yang mengatur kejahatan seksual, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

e. Sistem Peradilan:

Hukum Qanun di Aceh: Hukum Qanun di Aceh menggunakan sistem peradilan syariah yang memiliki pengadilan sendiri. Kedudukan qanun memang tidak bisa disamakan dengan Undang-Undang, karena pemaknaan qanun sendiri dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 sendiri yang menyebutkan qânûn

merupakan Perda. Karena itu dari sisi hierarki perundang-undangan sebagai lex specialis yang harus disamakan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 bukan qânûn itu sendiri. Undang-Undang itulah yang menyamakan kedudukannya dengan Undang-Undang lainnya.

Oleh karenanya apabila qânûn misalnya secara substansi berlawanan dengan Undang-Undang maka hal tersebut dapat dibenarkan secara yuridis selama qânûn yang diatur tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Qânûn dari sisi proses pembentukannya merupakan produk legislatif yang ada di daerah sementara Peraturan Pemerintah apalagi Undang-Undang merupakan produk legislatif di tingkat Pemerintah pusat sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Karena itu sesuai teori hierarki maka ketentuan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 4 TAP MPR Nomor III/2000 menyebutkan "sesuai dengan Tata urutan Perundang-undangan, maka setiap aturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.

Ketentuan dalam TAP MPR Nomor III/2000 sekarang sudah dicabut menjadi menjadi UndangUndang RI Nomor 10 Tahun 2004 dalam Pasal 7 ayat (5) disebutkan bahwa " Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) UndangUndang RI Nomor 10 Tahun 2004 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 9 ayat (1) yang menentukan bahwa dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945 maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sementara dalam ayat (2) menentukan bahwa apabila dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

3. Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Pelaku Seks Bebas dalam Mencegah dan Menanggulangi Seks Bebas di Aceh dan di Luar Provinsi Aceh

Hukum qanun masih belum efektif secara pencegahan, karena sosialisasi hukum qanun yang terkait Khalwat atau mesum sifatnya terbatas sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya aturan tersebut. Tempat-tempat yang sering terjadi kasus pelanggaran Khalwat telah masuk daftar hitam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, telah menjadi kawasan yang sering dilakukan razia dengan pencarian utama para pelanggar Khalwat yang sering ditemukan pada malam hari.

Mengenai pelaku yang melakukan pelanggaran hukum ini, masyarakat yang mayoritas melakukan pelanggaran Khalwat adalah kalangan remaja baik yang masih berstatus pelajar maupun mahasiswa. Walaupun tidak tersajikan data secara angka, hal ini dibuktikan dengan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti di sekitaran wilayah Kota Bandaaceh bahwasanya banyak sekali terjadi kasus pelanggaran Khalwat diberbagai tempat di Kota Bandaaceh yang dilakukan oleh kalangan remaja. Mayoritas usia remaja yang melakukan pelanggaran Khalwat berusia 17-25 tahun. Kalangan remaja di Kota Bandaaceh yang melakukan pelanggaran Khalwat biasanya pada sore hingga malam hari menjelang pukul 22.00.[10]

Faktor yang menjadi penghambat efektifitas penerapan hukum qanun tentang Khalwat ini adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Aceh terkait aturan yang mengatur tentang Khalwat. Selain itu, tidak adanya pelatihan khusus secara teknis bagi petugas guna meningkatkan teknis aparatur terkait penegakan aturan Khalwat ini. Hal ini juga dipengaruhi oleh sulitnya mengawasi penerapan hukum tersebut karena tidak ada sistem khusus untuk mengawasinya.

Selain itu, faktor yang membuat kurang efektifnya pemberlakuan hukum ini adalah kurangnya dana serta prasarana. Hal ini tentunya menghambat proses pelaksanaan hukuman cambuk yang ada. Dimana dana yang diperlukan serta

10 Zulkarnaen, "Efektivitas Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh.," *Jurnal Politikologi* 3, no. 1 (2016): 11–18.

profesionalitas aparatur yang ada belum memadai untuk melaksanakan hukuman secara efektif.[11] Akibatnya, walaupun putusan Mahkamah Syari'ah terkait penjatuhan hukuman cambuk telah inkrah pelaku tidak dapat langsung dieksekusi. Pelaku yang telah dijatuhi vonis justru ditahan dulu didalam penjara untuk menunggu tersedianya kebutuhan yang ada. Hal tersebut tentunya membuat esensi dari penerapan hukum qanun terkait Khalwat itu sendiri menjadi tidak terealisasi dengan baik.

Terkait hukum positif di Indonesia, aturan mengenai zina diatur pada Pasal 284 KUHP. Namun, Pasal 284 KUHP hanya mengatur tentang zina, sedangkan seks bebas dapat mencakup berbagai jenis tindakan seksual di luar nikah. Oleh karena itu, pasal ini mungkin tidak efektif dalam menangani kasus seks bebas secara keseluruhan. Untuk itu perlulah aturan yang lebih luas mengenai seks bebas ini. Hal ini didengar oleh para pembuat undang-undang, yang mana aturan mengenai seks bebas ini diperluas dengan penetapan dasar kebijakan diperluasnya tindak pidana zina dalam Pasal 417 RUU-KUHP (yang saat ini telah menjadi UU No.1 Tahun 2023), yaitu dengan diperluasnya makna zina.[12] Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aturan serta mengurangi kasus zina yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sayangnya, tidak ada tolak ukur yang mengindikasikan mengenai efektivitas aturan tersebut. Hal ini tentunya membuat perkembangan hukum positif terkait zina sulit untuk dilakukan. Untuk melihat tingkat efektivitasnya, hanya dapat dilakukan dengan melihat langsung ke kehidupan masyarakat.

Dilihat dari berjalannya kehidupan masyarakat sekarang, dapat diketahui bahwa aturan hukum positif terkait zina tersebut masih belum efektif dan tidak menimbulkan efek yang berarti. Hal ini dapat terlihat dari beberapa aspek yang ada, antara lain :

a. Masih maraknya kos-kosan bebas (hunian sementara)

11 Taryadi Taryadi, "Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jinayat Di Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Perspektif Qanun Hukum Acara Jinayah," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 2 (2020): 171–89, https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2313.

12 Mochamad Ramdhan Pratama, "Perluasan Makna Zina Dalam Pasal 417 Rancangan Kuhp Indonesia," *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 254–68.

Masih berjamurnya kos dengan konsep bebas ini merupakan salah satu indikator mengenai tingginya kasus zina yang ada. Hal ini karena kos dengan konsep bebas menerima penyewa dengan tidak memandang gender dalam satu kamar, sehingga potensi terjadinya zina sangatlah tinggi di kos semacam itu.

b. Maraknya prostitusi online

Prostitusi saat ini tidak hanya dilakukan di jalanan atau tempat-tempat khusus seperti dulu. Dapat dilihat banyaknya PSK yang menawarkan jasanya via aplikasi online, menandakan tingginya minat para pria hidung belang serta mengindikasikan meningkatnya zina.

Melihat contoh di atas, tentu hal tersebut menunjukan bahwa efektivitas dari aturan Pasal 417 RUU-KUHP (yang saat ini telah menjadi UU No.1 Tahun 2023) tidak terealisasi dengan optimal. Hal ini dapat dipengaruhi juga oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi terkait aturan tersebut. Sangat jarang terdengar adanya sosialisasi terkait pasal yang mengatur zina dalam kehidupan masyarakat ini. Hal tersebut tentu membuat masyarakat menjadi tidak tahu dan tidak peduli dengan aturan tersebut.

D. Penutup

Perbedaan antara sanksi pidana terhadap pelaku seks bebas menurut Hukum Qanun Aceh yang mana terhadap pelaku dapat dipidana cambuk maksimal 100 kali, denda, dan bagi yang tidak mampu melaksanakan kedua pidana tersebut dapat diberikan pidana penjara, sedangkan Hukum Positif di Indonesia yang mana terhadap pelaku seks bebas hanya diatur tentang sanksi pidana penjara maksimal 9 bulan, Eksistensi sanksi pidana terhadap pelaku seks bebas ditinjau dari hukum Qanun di Aceh dan hukum positif Indonesia masih belum mampu menekan angka zina. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi dan aparatur yang kurang tegas dan kurang profesional dalam menangani kasus. Selain itu, tidak ada pelatihan secara khusus untuk menghadapi kasus seks bebas. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan yang lebih serius dan terpadu untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk seks bebas. Upaya ini dapat

dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga moral dan etika dalam kehidupan berkeluarga, serta memberikan pendidikan seksual yang tepat dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, Rina, Suhrawardi, and Hapisah. "Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Remaja Dengan Perilaku Seksual Pranikah." *Jurnal Inovasi* 2, no. 10 (2022): 3441–46.

Ismatullah, Deddy. *Materi Kuliah Sejarah Sosial Hukum Islam*, 2007.

Jasser, Auda. "Book Review : Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach." *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 2014, 59.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, 1992.

Mh, Mustafa. "ULIL AMRI AUTHORITY ON LIMITATION OF CONGREGATIONAL WORSHIPS IN THE PANDEMIC OF COVID-19 IN PERSPECTIVE OF FIQH SIYASAH." *Jurnal Al-Dustur* 3, no. 2 (September 10, 2020): 123–35. https://doi.org/10.30863/jad.v3i2.899.

Pratama, Mochamad Ramdhan. "Perluasan Makna Zina Dalam Pasal 417 Rancangan Kuhp Indonesia." *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 254–68.

Rahadi, Dewi Sartika, and Sofwan Indarjo. "Perilaku Seks Bebas Pada Anggta Club Motor X Kota Semarang Tahun 2017." *Journal of Health Education* 2, no. 2 (2017): 115–21.

Syafe'i, Rachmat. *Materi Kuliah Qânûn Dan Šyarî'ah*, 2007.

Syahrizal. *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam Di Aceh*, 2007.

Taryadi, Taryadi. "Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jinayat Di Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Perspektif Qanun Hukum Acara Jinayah." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 2 (2020): 171–89. https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2313.

Zulkarnaen. "Efektivitas Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh." *Jurnal Politikologi* 3, no. 1 (2016): 11–18.